

KARAKTERISTIK PEMETAAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN BEKASI

Lely Syiddatul Akliyah

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung, 40116

ABSTRAK

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yang ada di Kabupaten Bekasi sangat penting untuk diidentifikasi karena adanya keinginan dari Pemda kabupaten Bekasi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pemetaan dilakukan dengan teknis survey sampling ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Hasil dari pemetaan menunjukkan jumlah Penyandang cacat yang ada cukup banyak dan pada umumnya merupakan penyandang cacat fisik mental, bukan karena penderita penyakit kronis. Jumlah penyandang tuna susila di Kabupaten Bekasi hanya terkonsentrasi di beberapa kecamatan yaitu, Kecamatan Karang Bahagia, Cibarusah, Tambun Utara dan Sukakarya. Korban penyalahgunaan NAPZA dari tahun ke tahun meningkat terus akibat berbagai factor, khususnya factor lingkungan. Penyandang HIV/AIDS terkonsentrasi di Kecamatan Tambun Utara karena terkait dengan kegiatan penyandang tuna susila.

Keywords: *Lokasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yang ada di Kabupaten Bekasi, merupakan bagian yang perlu mendapat perhatian penting. Salah satu tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi Kabupaten Bekasi 2007 – 2012 adalah : “Masyarakat Agamis yang Ungul dalam Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata” maka salah satu upaya tersebut adalah melakukan pemetaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mengingat selama ini belum terdapat pemetaan PMKS tersebut. Pemetaan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menampilkan PMKS-PMKS yang terdapat di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Data sebaran PMKS selama ini belum terpetakan sehingga program bantuan untuk mereka belum tepat sasaran.

Untuk itu maka perlu dipetakan dan dilihat kecenderungan lokasi yang dominan dari kategorisasi PMKS tersebut. Dengan demikian maka program bantuan yang akan dilakukan pihak dinas dapat tepat sasaran.

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sebaran PMKS di Kabupaten Bekasi.

Adapun sasaran dari penelitian ini adalah : 1) Teridentifikasi Jumlah PMKS yang tersebar di Kabupaten Bekasi pada tahun 2011; 2) Terpetakan data – data PMKS yang ada berdasarkan lingkup kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun ruang lingkup kegiatan ini adalah Memetakan jumlah PMKS yang ada 4

Kecamatan antarlain Kecamatan Tarumajaya, Cikarang Selatan, Cibitung dan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi.

Metode Pendekatan dan Tahapan Kegiatan

Sesuai dengan arahan dalam KAK, dapat dipahami bahwa metode pendekatan yang menjadi tahap dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

Pengumpulan Data

Sumber data dapat diperoleh dari : 1) Data Primer (Melakukan survey langsung ke lapangan, melakukan wawancara kepada pihak- pihak yang terkait, baik itu masyarakat ataupun Pemerintah Daerah mengenai rencana studi.); 2) Data Sekunder (Sumber data melalui dokumentasi bahan- bahan bacaan yang relevan dan sumber data dapat diperoleh dari dinas/ instansi yang terkait.); 3) Proses Pengumpulan Data (Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang diperlukan meliputi : Proses a) Teknik Wawancara (Teknik wawancara digunakan untuk menggali data primer yang berasal dari nara sumber langsung., dimana dengan mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut pokok materi sehingga data yang terkumpul lebih akurat dan terpercaya.); b) Teknik Dokumentasi (Teknik dokumentasi ini digunakan untuk menggali data sekunder, dimana data yang diperoleh berasal dari dinas/ instansi terkait serta dokumen- dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.)

Proses Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah menggunakan analisa data kualitatif yang mencakup data yang tidak berbentuk angka, dan analisa data kuantitatif yaitu analisa data yang menggunakan angka serta analisa data evaluatif yaitu memberikan penilaian terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan skala atau kriteria tertentu kemudian menyimpulkannya.

Tahapan Pekerjaan: pertama yaitu Tahap Persiapan (Penetapan batas wilayah study yaitu Kajian Kelayakan Pembangunan Hotel : a) Mempersiapkan metodologi untuk survey

dan analisis, yaitu perencanaan dan penetapan metodologi yang akan dipergunakan dalam pembahasan/ analisis nantinya; b) Mempersiapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan, yaitu ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan kepada konsultan serta penetapan keterlibatan tenaga ahli dalam penetapan waktu tersebut; c) Mempersiapkan tenaga ahli, yaitu mempersiapkan semua komponen tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang diminta agar terdapat kesesuaian antara pekerjaan dengan keahliannya.

Kedua, Tahap Pengumpulan Data dan Study. Ketiga Pengumpulan Data Primer. Keempat Pengumpulan Data Sekunder. Kelima Tahap Studi Literatur.

Study ini dimaksud untuk menganalisis ditinjau dari aspek peraturan/kebijakan/, standar dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini

Tahap Analisa yaitu: 1) Analisis Situasi, Merupakan bagian intisari dari study ini yang memuat semua data dasar yang termasuk penilaian dan analisis serta asumsi yang digunakan yang terdiri dari: (Data Demografi wilayah; Kependudukan; Sosial ekonomi masyarakat) 2) Analisis kebijakan kabupaten; 3) Analisis Data Keadaan lokasi; 4) Analisis data social kabupaten; 5) Fenomena PMKS

Profil Umum Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar-Dasar Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat dan tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan sebagai lahirnya Kabupaten Bekasi. Mengingat perkembangan Kabupaten Bekasi yang cukup pesat, maka berdasarkan PP No. 48

Tahun 1981 dibentuk Kota Administratif Bekasi yang meliputi 4 wilayah kecamatan, yaitu Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Dan berdasarkan UU No. 9 Tahun 1996 tanggal 16 Desember 1996 Kota Administratif Bekasi ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Bekasi terdiri dari 15 kecamatan dan 187 desa. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 26 Tahun

2001 Wilayah Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 23 kecamatan yang terdiri dari 187 desa. Jumlah desa di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten, adapun luas wilayah dan jumlah desa per kecamatan secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 1** Berikut ini profil singkat Kabupaten Bekasi.

Batas-batas Kabupaten Bekasi :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang

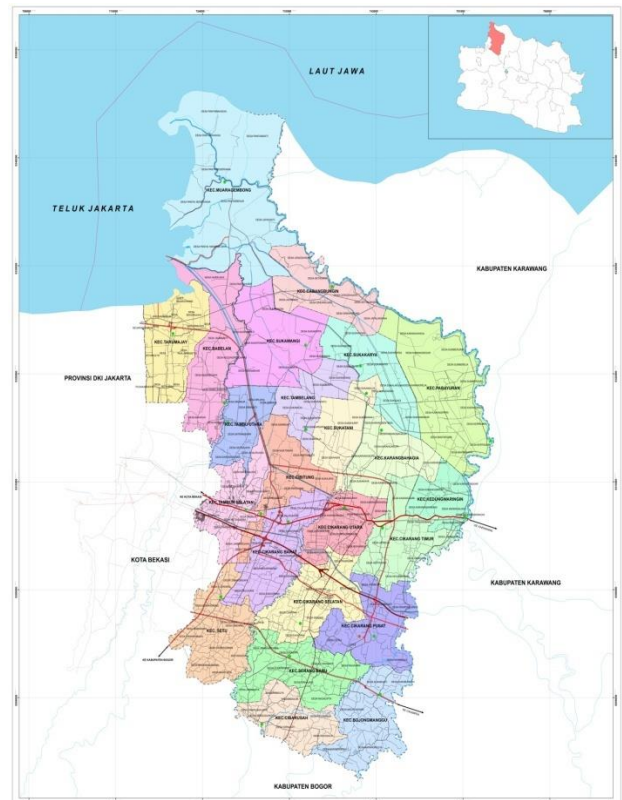
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **gambar 1** Peta Administrasi dan **tabel 1** profil singkat Kabupaten Bekasi.

Tabel 1
Profil Singkat Kabupaten Bekasi

Lokasi	106°48'28" - 107°27'29" BT dan 6°10'6" - 6°30'6" LS
Suhu rata-rata	28° C - 32° C
Kelembapan	80%
Ketinggian	6 - 115 m dpl
Curah Hujan	1.501 mm/tahun
Hari Hujan	85 hari
Luas Wilayah	1.273,88 km ²
Jumlah Kecamatan	23
Jumlah Desa	187
Jumlah Penduduk	2.027.092 jiwa
Kepadatan	1.465 jiwa/km ²
Jumlah Keluarga	477.883

Sumber : Situs Pemerintah Kabupaten Bekasi

127,388 Ha, maka rata-rata kepadatan penduduk mencapai 1,786 jiwa/km². Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 382.896 jiwa dan tingkat kepadatan 8,884 jiwa/km², sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Muaragembong (288 jiwa/km²). Jumlah penduduk paling sedikit terdapat terdapat di Kecamatan Bojongmangu yaitu 27.205 jiwa. Untuk lebih jelas tersaji pada **tabel 2** berikut.



Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Bekasi

Kependudukan

Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi menurut data Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2010 sebanyak 2.274.842 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.164.257 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.110.585 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar

Tabel 2
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km² Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk			Kepadatan (jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Setu	6,216	43.835	42.264	86.099	1,385
2	Serang Baru	6,380	35.584	34.350	69.934	1,096
3	Cikarang Pusat	5,174	23.296	22.976	46.272	972
4	Cikarang Selatan	4,760	46.884	44.324	91.208	1,763
5	Cibarusah	5,131	34.984	32.605	67.589	1,341
6	Bojongmangu	5,369	13.710	13.495	27.205	453
7	Cikarang Timur	4,330	42.250	40.519	82.769	1,613
8	Kedungwaringin	5,039	29.706	28.086	57.792	1,833
9	Cikarang Utara	6,006	92.546	87.466	180.012	4,157
10	Karang Bahagia	3,153	43.928	42.390	86.318	1,872
11	Cibitung	4,610	82.857	78.596	161.453	3,564
12	Cikarang Barat	4,530	90.628	83.855	174.483	3,250
13	Tambun Selatan	4,310	195.231	187.665	382.896	8,884
14	Tambun Utara	3,442	50.914	49.010	99.924	2,903
15	Bebelan	6,360	84.664	80.483	165.147	2,597
16	Tarumajaya	5,463	47.669	44.750	92.419	1,692
17	Tambelan	6,719	19.738	19.047	38.785	1,023
18	Sukawangi	3,791	23.558	22.879	46.437	691
19	Sukatani	3,752	36.275	35.019	71.294	1,900
20	Sukakarya	4,240	24.998	24.091	49.089	1,158
21	Pebayuran	9,634	52.625	50.505	103.130	1,070
22	Cabangbungin	4,970	27.436	26.750	54.186	1,090
23	Muaragembong	14,009	20.941	19.460	40.401	288
Kabupaten Bekasi		127,388	1.164.257	1.110.585	2.274.842	1,786

Sumber : Kabupaten Bekasi dalam Angka 2010

Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1.568.924 orang. Sedangkan penduduk yang belum produktif (< 15 tahun) sebanyak 636.377 orang dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) 69.541 orang, untuk lebih jelas tersaji pada **tabel 3** berikut.

Tabel 3
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2009

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	94.880	86.541	181.421
5-9	121.483	110.925	232.408
10-14	115.714	106.834	222.548
15-19	103.322	99.517	202.839
20-24	128.372	141.812	270.184
25-29	125.893	138.433	264.326
30-34	122.520	118.168	240.688
35-39	100.917	89.261	190.178
40-44	76.566	65.554	142.120
45-49	52.395	43.890	96.285
50-54	42.416	33.331	75.747

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
55-59	24.150	20.703	44.853
60-64	21.831	19.873	41.704
65-69	11.809	12.627	24.436
70-74	10.857	11.324	22.181
75 +	11.132	11.792	22.924
Jumlah	1.164.257	1.110.585	2.274.842

Sumber : Kabupaten Bekasi dalam Angka Tahun 2010

Banyaknya Rumah Tangga dan Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga

Banyaknya rumah tangga dan rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Bekasi tahun 2009 tersaji pada **tabel 4** berikut.

Tabel 4
Banyaknya Rumah Tangga dan Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga Tahun 2009

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga
1	Setu	27.147	3,17
2	Serang Baru	29.006	2,41
3	Cikarang Pusat	16.446	2,81
4	Cikarang Selatan	34.347	2,66
5	Cibarusah	20.234	3,34
6	Bojongmangu	7.703	3,53
7	Cikarang Timur	25.716	3,22
8	Kedungwaringin	15.767	3,67
9	Cikarang Utara	66.466	2,71
10	Karang Bahagia	23.429	3,68
11	Cibitung	47.284	3,41
12	Cikarang Barat	53.096	3,29
13	Tambun Selatan	92.136	4,16
14	Tambun Utara	33.640	2,97
15	Bebelan	53.764	3,07
16	Tarumajaya	26.558	3,48
17	Tambelan	9.773	3,97
18	Sukawangi	11.951	3,89
19	Sukatani	18.390	3,88
20	Sukakarya	12.717	3,86
21	Pebayuran	28.800	3,58
22	Cabangbungin	14.661	3,70
23	Muaragembong	10.719	3,77
Kabupaten Bekasi		679.750	78

Sumber : Kabupaten Bekasi dalam Angka Tahun 2010

Fenomena Kemiskinan dan PMKS di Kabupaten Bekasi

Kondisi Kemiskinan Kabupaten Bekasi

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan Maret 2011 sebanyak 4 648 630 orang (10,65%). Mengalami penurunan sebesar 125 090 orang dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2010 yang berjumlah 4 773 720 orang (11,27%). Dalam kurun waktu setahun terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun sebesar 0,56% sedangkan di daerah perkotaan turun 0,17%. Secara absolut selama periode Maret 2010 – Maret 2011, penduduk miskin di pedesaan berkurang 429 260 orang sementara di perkotaan naik sebanyak 304 160 orang. Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan pada bulan Maret 2011

terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 42,89%. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2010 (50,76%). Presentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan pada bulan Maret 2011 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 57,11%. Ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Maret 2010 (49,23%).

Data Hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE05) BPS Tahun 2005, menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang di duga miskin di Provinsi Jawa Barat, mencapai 2 979 618 jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat tersaji pada **tabel 5** berikut. Kabupaten Bekasi menduduki peringkat ke 13 dengan jumlah rumah tangga yang diduga miskin mencapai 115 539.

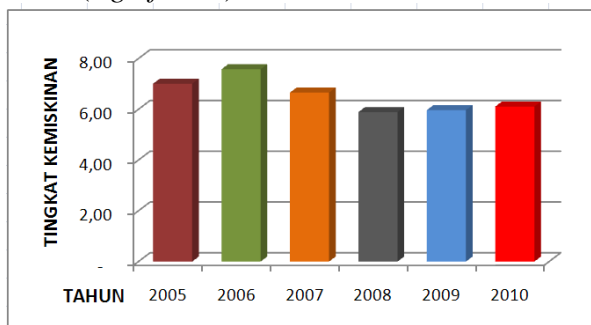
Tabel 5
Jumlah Rumah Tangga yang Diduga Miskin Hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE05) BPS

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang di duga miskin
1	Kabupaten Bandung	282 766
2	Kabupaten Bogor	280 707
3	Kabupaten Sukabumi	231 480
4	Kabupaten Garut	221 349
5	Kabupaten Cirebon	205 896
6	Kabupaten Cianjur	196 722
7	Kabupaten Karawang	196 125
8	Kabupaten Indramayu	171 348
9	Kabupaten Subang	147 732
10	Kabupaten Tasikmalaya	144 275
11	Kabupaten Ciamis	119 457
12	Kabupaten Majalengka	115 843
13	Kabupaten Bekasi	115 539
14	Kabupaten Kuningan	86 743
15	Kabupaten Sumedang	83 432
16	Kabupaten Purwakarta	58 943
17	Kota Bandung	84 675
18	Kota Bekasi	61 087
19	Kota Bogor	41 582
20	Kota Tasikmalaya	40 305
21	Kota Depok	32 348
22	Kota Cimahi	21 993
23	Kota Cirebon	15 048
24	Kota Sukabumi	13 231
25	Kota Banjar	10 992
Jawa Barat		2 979 618

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, September 2005

Secara dinamis, yaitu dari waktu ke waktu, kemiskinan di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan dari tahun 2006 hingga

2010. Informasi ini dilihat dari data tingkat kemiskinan yang diilustrasikan pada **Gambar 2** Hanya saja, berdasarkan data Kabupaten Bekasi Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2011 dengan data terakhir tahun 2010 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi mencapai angka 6,11 persen. Jumlah meningkat 0,14 persen dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu sebesar 5,97 persen. Perkembangan kemiskinan demikian menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menanggulangnya supaya ke depan tingkat kemiskinan dapat diturunkan secara berarti (*significant*).



Gambar 2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2010

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2011

Perkembangan angka kemiskinan tersebut memberikan dampak terhadap kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 6** indeks tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan pun menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hanya saja, indeks pada tahun 2010 perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kecenderungan yang meningkat kembali.

Tabel 6
Data Kemiskinan dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bekasi Tahun 2005 - 2010

Data Kemiskinan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tingkat Kemiskinan	7.01	7.58	6.66	5.89	5.97	6.11
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.55	1.25	1.19	1.19	0.85	0.88
Indeks Keparahannya Kemiskinan	0.49	0.30	0.35	0.30	0.20	0.18

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2011
Ket : Data Prov. Tahun 2010 adalah data Agregat, tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengangguran adalah salah satu faktor timbulnya kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk usia kerja atau berumur 15 tahun atau lebih di Kabupaten Bekasi Tahun 2010 sebanyak 1 547 979 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 1 017 208 jiwa merupakan angkatan kerja atau sekitar 60,35 persen dari jumlah angkatan kerja tersebut terdapat jumlah pencari kerja, dan ini merupakan jumlah tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi sebanyak 105 846 atau sekitar 10,41 persen. Perkembangan angka pengangguran selengkapnya disajikan pada **Tabel 7** berikut.

Tabel 7
Penduduk Menurut Angkatan Kerja Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2009

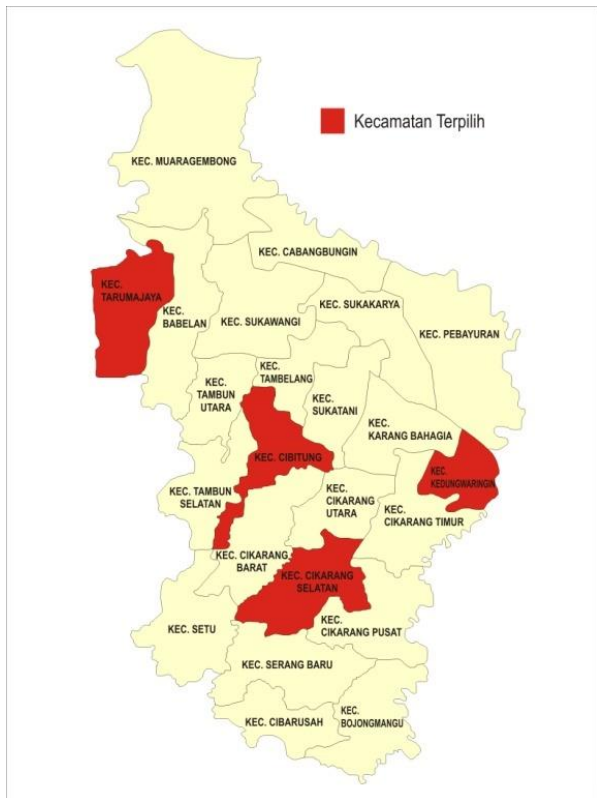
No	Tahun	Angkatan Kerja			Angkatan Kerja (persen)		
		Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah
1	2005	720 896	77 484	798 380	90,29	9,71	100
2	2006	742 586	76 390	818 876	90,67	9,33	100
3	2007	776 984	57 800	834 784	93,08	6,92	100
4	2008*	854 404	130 930	985 334	86,71	13,29	100
5	2009*	911 362	105 846	1 017 208	89,59	10,41	100

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2011
* : pada tahun 2008-2009, penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih

Pemilihan Lokasi Penelitian dan Fokus PMKS

Fokus lokasi kecamatan untuk pengambilan sampling dalam kegiatan pemetaan masalah kesejahteraan sosial ini yaitu di (1) Kecamatan Tarumajaya, (2) Cikarang Selatan, (3) Cibitung dan (4) Kecamatan Kedungwaringin.

Sedangkan untuk fokus masalah PMKS yang di ambil antara lain : Lanjut usia terlantar, Penyandang cacat, Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis, Tuna susila, Korban penyalahgunaan NAPZA, Pengidap HIV/AIDS dan Keluarga rentan. Gambar 3. dibawah ini menyajikan peta kecamatan terpilih sebagai berikut:

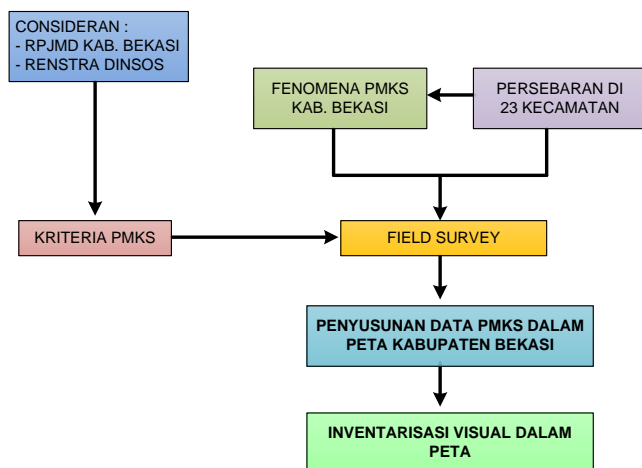


Gambar 3 Fokus Kecamatan Terpilih

Langkah Penelitian

Kerangka Pemikiran Studi

Bagan alir sebagai bentuk kerangka pemikiran pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 4**.



gambar 4 Kerangka Pemikiran Studi

Teknik Analisis

Metode dan teknik pemetaan sosial dalam kajian ini meliputi survey formal, pemantauan cepat (rapid appraisal) dan metode partisipatoris (participatory method) (LCC,

1977; Suharto, 1997; World Bank, 2002). Dalam wacana penelitian sosial, metode survey formal termasuk dalam pendekatan penelitian makro-kuantitatif, sedangkan metode pemantauan cepat dan partisipatoris termasuk dalam penelitian mikro-kualitatif (Suharto, 1997).

Survey Formal

Survey formal dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi standar dari sampel orang atau rumahtangga yang diseleksi secara hati-hati. Survey biasanya mengumpulkan informasi yang dapat dibandingkan mengenai sejumlah orang yang relatif banyak pada kelompok sasaran tertentu. Beberapa metode survey formal antara-lain :

Survey Rumahtangga Beragam-Topik (Multi-Topic Household Survey). Metode ini sering disebut sebagai Survey Pengukuran Standar Hidup atau Living Standards Measurement Survey (LSMS). Survey ini merupakan suatu cara pengumpulan data mengenai berbagai aspek standar hidup secara terintegrasi, seperti pengeluaran, komposisi rumah tangga, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, fertilitas, gizi, tabungan, kegiatan pertanian dan sumber-sumber pendapatan lainnya. 1) Kuesioner Indikator Kesejahteraan Inti (Core Welfare Indicators Questionnaire atau CWIQ). Metode ini merupakan sebuah survey rumah tangga yang meneliti perubahan-perubahan indikator sosial, seperti akses, penggunaan, dan kepuasan terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Metode ini merupakan alat yang cepat dan efektif untuk mengetahui rancangan kegiatan pelayanan bagi orang-orang miskin. Jika alat ini diulang setiap tahun, maka ia dapat digunakan untuk memonitor keberhasilan suatu kegiatan. Sebuah hasil awal dari survey ini umumnya dapat diperoleh dalam waktu 30 hari; 2) Survey Kepuasan Klien (Client Satisfaction Survey). Survey ini digunakan untuk meneliti efektifitas atau keberhasilan pelayanan pemerintah berdasarkan pengalaman atau aspirasi klien (penerima pelayanan). Metode yang sering disebut sebagai service delivery survey ini mencakup penelitian mengenai hambatan-

hambatan yang dihadapi penerima pelayanan dalam memperoleh pelayanan publik, pandangan mereka mengenai kualitas pelayanan, serta kepekaan petugas-petugas pemerintah; 3) Kartu Laporan Penduduk (Citizen Report Cards). Teknik ini sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mirip dengan Survey Kepuasan Klien, penelitian difokuskan pada tingkat korupsi yang ditemukan oleh penduduk biasa. Penemuan ini kemudian dipublikasikan secara luas dan dipetakan sesuai dengan tingkat dan wilayah geografis; 4) Laporan Statistik. Pekerja sosial dapat pula melakukan pemetaan sosial berdasarkan laporan statistik yang sudah ada. Laporan statistik mengenai permasalahan sosial seperti jumlah orang miskin, desa tertinggal, status gizi, tingkat buta huruf, dll. biasanya dilakukan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data sensus.

Pemantauan Cepat (Rapid Appraisal Methods)

Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai kondisi geografis dan sosial-ekonomi.

Metode Pemantauan Cepat meliputi: 1) Wawancara Informan Kunci (Key Informant Interview). Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individu-individu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur; 2) Diskusi Kelompok (Focus Group Discussion). Diskusi kelompok dapat melibatkan 8-12 anggota yang telah dipilih berdasarkan kesamaan latarbelakang. Peserta diskusi bisa para penerima pelayanan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), atau para ketua Rukun Tetangga. Fasilitator menggunakan petunjuk diskusi, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil

pengamatannya; 3) Wawancara Kelompok Masyarakat (Community Group Interview). Wawancara difasilitasi oleh serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada semua anggota masyarakat dalam suatu pertemuan terbuka. Pewawancara melakukan wawancara secara hati-hati berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya; 4) Pengamatan Langsung (Direct Observation). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai kondisi geografis, sosial-ekonomi, sumber-sumber yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial, dll.

Survey Kecil (Mini-Survey). Penerapan kuesioner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah kecil sample (antara 50-75 orang). Pemilihan responden dapat menggunakan teknik acak (random sampling) ataupun sampel bertujuan (purposive sampling). Wawancara dilakukan pada lokasi-lokasi survey yang terbatas seperti sekitar klinik, sekolah, balai desa

Kesimpulan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dominan di Kabupaten Bekasi ialah Keluarga Fakir Miskin. Kriteria PMKS ini meliputi 3,6% dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi.

Jumlah Penyandang cacat yang ada cukup banyak dan pada umumnya merupakan penyandang cacat fisik mental, bukan karena penderita penyakit kronis.

Jumlah penyandang tuna susila di Kabupaten Bekasi hanya ada di beberapa kecamatan bahkan hanya terkonsentrasi di beberapa kecamatan yaitu, Kecamatan Karang Bahagia, Cibarusah, Tambun Utara dan Sukakarya.

Korban penyalahgunaan NAPZA dari tahun ke tahun meningkat terus akibat berbagai factor, khususnya factor lingkungan.

Penyandang HIV/AIDS terkonsentrasi di Kecamatan Tambun Utara karena terkait dengan kegiatan penyandang tuna susila.

Kriteria keluarga rentan sangat terkait dengan keluarga fakir miskin, namun jumlahnya tidak begitu banyak karena pada umumnya keluarga usia muda di Kabupaten Bekasi memiliki pekerjaan yang layak

Daftar Pustaka

- Porteous, J.D. 1977. *Environment and Behavior*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. Philippines. 446 p.
- Doyal, L. &Gough, I. 1991, *A Theory of Human Need*, Macmillan, london
- Germain, C. 1991, *Human Behaviour in the Social Environment: An Ecological View*, Columbia University Press, New York